

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Management of School Operational Assistance Funds (BOS)

Sri Rahayuningsih^{1 2}

¹Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

²Email: srahayuningsih278@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019 SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto, Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Wawancara, dokumentasi dan observasi sebagai pengumpulan data. Analisis data yang dipakai di antaranya adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan kesimpulan akhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perencanaan dana BOS SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto melaksanakan penyusunan RKAS dan RAB. (2) pelaksanaan dana BOS SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto, penyaluran dana tiap triwulan, pengambilan dana oleh bendahara dan kepala sekolah, penggunaan dana untuk kegiatan operasional sekolah non-personalia, pembelanjaan dilakukan oleh tim belanja barang/jasa, pembukuan dilaksanakan oleh bendahara berdasarkan bukti (3) pengawasan dilaksanakan secara internal dan eksternal (4) pelaporan dana dilaksanakan setiap semester.

Kata kunci: Dana BOS SMPM1; Perencanaan; Pelaksanaan; Pengawasan dan evaluasi; Pelaporan

Abstract: *This study aims to explain the management of School Operational Assistance (BOS) funds in 2019 SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto, Banyumas. This research uses a descriptive qualitative approach. Interview, documentation, and observation as data collection. Data analysis used includes data collection, data reduction, data presentation, data verification, and conclusions. The results of this study indicate that (1) planning for BOS funds at SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto carries out the preparation of RKAS and RAB. (2) implementation of BOS funds at SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto, distribution of funds every quarter, withdrawal of funds by treasurers and school principals, use of funds for non-personnel school operational activities, spending is carried out by the goods/services shopping team, bookkeeping is carried out by the treasurer based on evidence (3) supervision is carried out internally and externally (4) fund reporting is carried out every semester.*

Keywords: *BOS Fund SMPM1; Planning; Implementation; Monitoring and evaluation; Reporting*

Pendahuluan

Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Pembangunan suatu bangsa meliputi pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Kebijaksanaan pembangunan non-fisik berupa pembangunan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan. Pendidikan dalam jangka pendek diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar. Program BOS merupakan upaya pemerintah menyukseskan Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang menyangkut pembiayaan pendidikan di Indonesia. Salah satu yang tidak dapat ditinggalkan dalam mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa adalah peran negara dalam menyediakan biaya pendidikan. Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik

ditingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional dan personalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dalam pelaksanaannya penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, (Mulyono, 2010: 170). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 26 Tahun 2014, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional dan personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai program wajib belajar. Hallak (1969: 13) mendefinisikan tentang konsep biaya yaitu: ... the real cost corresponds to the opportunity cost; it is assumed that throughout the economic life of any good there is always a choice of alternatives, and that the cost of any choice must be expressed in terms of the "opportunity forgone" to achieve the alternatives. Artinya biaya riil sesuai dengan biaya kesempatan, diasumsikan bahwa seluruh kehidupan ekonomi selalu ada pilihan alternatif, dan bahwa biaya pilihan apapun harus dinyatakan dalam hal 'kesempatan yang hilang' untuk mencapai alternatif tersebut. Supriadi (2006: 4) dalam penjelasannya mengkategorikan biaya pendidikan meliputi beberapa hal biaya langsung (direct cost), biaya tidak langsung (indirect cost), biaya pribadi (private cost), dan biaya sosial (social cost) dalam bentuk moneter maupun nonmoneter. Oleh karena itu dana BOS perlu dikelola dengan baik dengan harapan mampu membantu ketercapaian tujuan program BOS yang efektif dan efisien. Pengelolaan dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.

Menurut Fitri (2014: 34), Pengembangan sekolah secara menyeluruh akan menjadi dasar perencanaan dan penggunaan dana BOS oleh Kepala Sekolah tertentu, baik pengembangan jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam perencanaan penggunaan dana BOS agar penggunaannya efektif, efisien dan tepat sasaran serta mendorong meningkatnya kualitas pembelajaran di sekolahnya. Menurut Rutter et. Al. (1979) dan Johnson (1993:167) menyatakan bahwa keefektifan organisasi pendidikan terletak pada: (1) pentingnya jam pelajaran yang penuh tidak ada yang kosong, (2) kerjasama yang baik antar pelajar, (3) memperhatikan kondisi fasilitas dan ketersediaan anggaran, (4) konsisten dalam memberikan ganjaran atau hukuman atas sikap siswa.

Dalam rangka implementasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di sekolah, dana BOS diharapkan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana BOS secara transparan artinya dalam pengelolaan dana BOS diketahui oleh stakeholder sekolah. Pengelolaan dana BOS secara akuntabel artinya dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS kepada pemerintah maupun masyarakat. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS kepada publik merupakan salah satu wujud kontrol dari masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Bantuan dana BOS yang diterima oleh sekolah dipertanggungjawabkan serta dilaporkan kepada dinas pendidikan provinsi dan pusat sebagai pengawas eksternal dan dipertanggungjawabkan juga kepada komite dan dinas pendidikan kabupaten sebagai pengawas internal. Secara umum dana yang dilaporkan berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan dana BOS.

Mulyono (2010: 77) mendefinisikan bahwa pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitikberatkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus

ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang harus dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak sekolah. Hal yang penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berapa besar uang yang harus dibelanjakan, darimana sumber uang yang diperoleh, dan kepada siapa uang yang harus dibelanjakan. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 mengatur tentang tujuan, sasaran, waktu dan pengelolaan BOS. Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Secara umum BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Program Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.

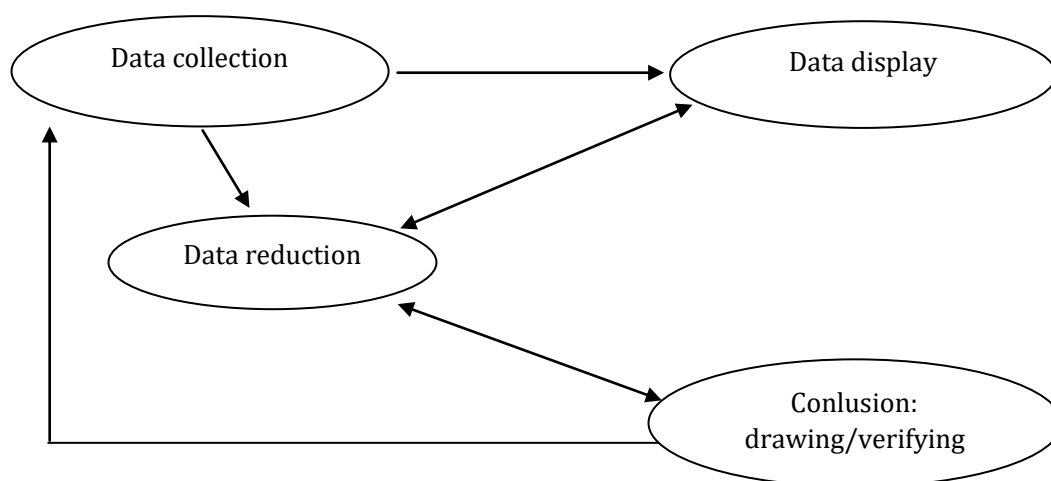
Pada tahun 2019 BOS yang diterima oleh SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan, dengan besar satuan biaya sebagai berikut SMP sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun. Penyaluran BOS dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari s/d Maret, April s/d Juni, Juli s/d September, dan Oktober s/d Desember. Tahun 2019 berjumlah Rp. 597.000.000,00 BOS di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto dikelola dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. pengelolaan BOS dengan menggunakan MBS dilaksanakan mengelola secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto membuat laporan untuk melihat kemajuan melalui rekaman, penelitian dan penyelidikan bahwa segala sesuatu sesuai rencana. Dapat diartikan bahwa pelaporan memverifikasi kemajuan melalui catatan, penelitian, dan inspeksi, memastikan bahwa sesuatu terjadi sesuai rencana yang telah ditetapkan, mengambil tindakan korektif artinya bila diperlukan rencana dapat segera ditata ulang, dan membuat orang-orang kepada siapa eksekutif bertanggung jawab informasi. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan dengan mencatat, meneliti, dan menginspeksi merupakan laporan yang harus dibuat oleh para pemimpin dalam memverifikasi kemajuan suatu kegiatan.

Prosedur pelaksanaan dana BOS diawali dengan proses pendataan pendidikan dasar. Tahapan pendataan data pokok pendidikan (Dapodik) merupakan langkah awal penting untuk proses pengalokasian dana BOS dan penyaluran dana BOS. Prosedur selanjutnya adalah proses penetapan alokasi dana BOS, persiapan penyaluran dana BOS di daerah, penyaluran dana BOS, dan pengambilan dana BOS (Kemendikbud, 2015: 20) tahun 2020 ada perubahan kebijakan terkait dengan dana BOS yaitu pada mekanisme penyaluran, besaran harga satuan, dan penggunaan dana BOS. Perubahan tersebut adalah (a) Penyaluran Dana Langsung ke Rekening Sekolah; (b) Penetapan SK Sekolah Penerima oleh Mendikbud; (c) harga satuan BOS per 1 peserta didik setiap tahun: SMP Rp. 1.100.000, semula Rp. 1.000.000,; (d) Pembayaran guru honor dan tenaga kependidikan pada sekolah negeri dan guru pada sekolah Yayasan maksimal 50%, (Pointer BOS th 2020). Pemerintah dalam menetapkan aturan di atas untuk menegaskan, bahwa penggunaan/pembelanjaan dana BOS untuk belanja operasional satuan pendidikan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019 di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi yang hasilnya dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian. Menurut Burhan Bungin (2009: 36) penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan berbagai kondisi, situasi atau variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, trnaskrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya (Suharsimi 2010: 274). Penggunaan dokumen dalam penelitian ini untuk memperoleh data secara objektif pengelolaan dana BOS SMP Muhammadiyah ! Purwokerto ditinjau dari segi pelaporan dan tertib administrasi. Data dokumentasi yang diperlukan mengenai prinsip pelaporan dan tertib administrasi terdiri dari: Data Pengelolaan Dana BOS yang meliputi pembukuan dana BOS, laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana BOS, dan dokumen lainnya yang relevan. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah: (a) Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari hasil dokumentasi kepada pihak pengelola dana BOS di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto; (b) Data sekunder adalah data pendukung dari beberapa sumber tertulis yakni berasal dari dokumen dana BOS dan buku mengenai peraturan teknis penyelenggaraan dan BOS.

Analisis data atau pengolahan data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Teknik analisis data yang dipakai oleh peneliti adalah teknis analisi data model interaktif milik Miles dan Huberman (Sugiyono, 2003: 338), yang meliputi: (a) Tahap Pengumpulan Data, merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti baik sebelum penelitian, pada saat penelitian dan bahkan diakhir penelitian; (b) Reduksi Data, proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. Hasil observasi, hasil dokumentasi, diubah menjadi bentuk tulisan (script) sesuai dengan formatnya masing masing; (c) Display Data, mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorisasi, serta akan memecah tema tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana; (d), kesimpulan/Verifikasi, merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif, proses analisis tersebut seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1. Model Miles & Huberman (Sugiyono, 2013: 338)

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan Proses Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RAKS) dan Rencana Anggaran Biaya Sekolah (RAB) BOS

Penyusunan RAKS berdasarkan kebutuhan oleh masing masing guru dan karyawan untuk jangka waktu yang telah ditentukan. RAKS disusun berdasarkan perencanaan kerja tahunan dan dapat menetapkan anggaran pendapatan belanja sekolah. Guru dan karyawan akan dikumpulkan untuk diminta kebutuhan sebelum disampaikan kepada komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pada tahap akhir dari proses penyusunan ini akan disampaikan pada rapat pleno. Terkadang dipertengahan tahun rencana yang telah disusun tidak sesuai dengan operasi yang nyata, sebab kegiatan yang seharusnya dilakukan ternyata tidak terealisasi sehingga dilakukan RAKS penyesuaian atau perubahan. Jika hal demikian terjadi maka anggaran RAKS yang telah disusun akan diubah dan disesuaikan dengan fakta dan kondisi yang ada. Selain dana BOS SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto memiliki beberapa sumber dana yang membantu berjalannya kegiatan operasional sekolah yang berasal dari yayasan dan komite/masyarakat. Setiap dana yang digunakan sekolah ada dasar aturan dalam penggunaannya dan peraturan teknis jika itu datang dari pemerintah pusat, berupa dana BOS harus dialokasikan pada penggunaan atau pembiayaan non operasional sekolah.

Analisis hasil penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAKS) dengan penyusunan Rencana Anggaran Sekolah (RAB) dilaksanakan secara bersamaan, Dana BOS SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto hanya digunakan terhadap kegiatan operasional sekolah non personalia. Dalam hal ini pemerintah pusat sangat membantu sekolah dengan tersedianya dana BOS SMP terhadap kelancaran program dan pengelolaan sekolah. Analisis hasil penelitian pada pelaksanaan aspek penyaluran, pada penyaluran dana BOS SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto dilakukan setiap triwulan sekali sehingga dalam satu tahun empat kali penyaluran. Petunjuk teknis BOS SMP tahun 2019 menjelaskan besaran dana yang diterima adalah tiap triwulan, triwulan I Rp. 136.249.800,=, triwulan II Rp. 203.227.375,=, triwulan III Rp. 128.908.825,= dan triwulan IV Rp. 128.614.000,=

Pelaksanaan Aspek Pengambilan Dana BOS

Dokumen pengambilan dana wajib diserahkan kepada pihak penyalur Bank dan menandatangani dokumen dari pihak Bank. Sekolah dapat melakukan pengambilan dana secara tunai atau dipindahkan ke kas Bank sekolah. Pelaksanaan aspek penggunaan dana BOS SMP memiliki aturan dalam penggunaannya, penjelasan secara rinci dalam penggunaan dana juga terdapat larangannya. SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto telah menggunakan dana sesuai peraturan teknis BOS SMP. Adapun penggunaan dana BOS SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	%	Jumlah Dana (Rp)
1.	Standar Pengembangan Kompetensi Kelulusan	6,3	37.560.000
2.	Standar Pengembangan ISI	0,23	1.378.925
3.	Pengembangan Standar Proses	6,7	40.282.500
4.	Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2,7	16.298.500
5.	Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana Sekolah	16,7	99.087.360
6.	Pengembangan Standar Pengelolaan	25,7	153.618.515
7.	Pengembangan Standar Pembiayaan	30,5	182.110.000
8.	Pengembangan Standar Implementasi Sistem Penilaian	11,2	66.664.200
JUMLAH		100%	597.000.000

Sumber: LPJ BOS SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun 2019

Tabel di atas merupakan penggunaan dan persentase dana BOS SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. Penggunaan dana BOS di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun 2019 rata rata banyak digunakan untuk standar pengelolaan sekolah sebesar Rp. 153.618.515 (25,7%), kegiatan pengembangan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 99.087.360 (16,7%), Pengembangan Standar Implementasi Sistem Penilaian Rp. 66.664.200 (11,2%), Pengembangan Standar Proses Rp. 40.282.500 (6,7%), Standar Pengembangan Kompetensi Kelulusan (SKL) Rp. 37.560.000 (6,3%), Pengembangan Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Rp. 16.298.500 (2,7%) dan Pengembangan Standar ISI Rp. 1.378.925 (0,23%) dari total penggunaan dana BOS SMP, hal ini terjadi secara umum sekolah menginginkan terwujudnya tujuan BOS SMP dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang tertuang dalam yujuan SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto, sebab hal ini langsung dirasakan tingkat kemajuannya oleh peserta didik dan tersedianya kelengkapan fasilitas sekolah.

Perbandingan penggunaan dana BOS SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun 2019 an dana yang dialokasikan ada hasil prosentase yang kecil yaitu terdapat pada pengembangan standar pembiayaan Rp. 182.110.000 (30,5%) dan standar pengelolaan sekolah sebesar Rp. 153.618.515 (25,7%), kegiatan pengembangan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 99.087.360 (16,7%), Standar Implementasi Sistem Penilaian Rp. 66.664.200 (11,2%), Pengembangan Standar Proses Rp. 40.282.500 (6,7%), Standar Pengembangan Kompetensi Kelulusan (SKL) Rp. 37.560.000 (6,3%), Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp. 16.298.500 (2,7%) dan Pengembangan Standar ISI sebesar Rp. 1.378.925 (0,23%) dari total penggunan dana BOS SMP, hal ini terjadi karena adanya penghematan dana seminimal mungkin yang akan digunakan untuk rencana kegiatan lainnya. Pengembangan perpustakaan dalam penggunaannyasekolah hanya sebagian membelikan buku teks pelajaran siswa kurikulum 2013 dan buku panduan guru kurikulum 2013 karena mengingat persediaan tahun lalu masih ada dan layak dipakai untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar.kegiatan penerimaan siswa baru dalam penggunaannya untuk penggandaanformulir pendaftaran PPDB dan buku administrasi, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah seperti diklat dan musyawarah guru mata pelajaran lokasi kegiatan dan pemberangkatan guru yang biasa hadir tidak jauh dan tidak membutuhkan penggunaan dana besar, dan mengingat dari semua penggunaan dana BOS SMP harus berdasarkan skala prioritas.

Rincian penggunaan dana BOS di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto telah disesuaikan dengan hasil rapat yang telah disusun pada awal tahun. Perencanaan yang kurang lengkap ataupun terdapat rencana yang tidak terealisasi, maka sekolah membuat perencanaan anggaran perubahan yang kemudian dikonfirmasi kepada Pemerintah Pusat. Pelaksanaan aspek pembelanjaan dana BOS SMP, kegiatan pembelian barang/jasa yang dibiayai dengan dana BOS SMP memiliki aturan khusus seperti yang sudah diatur dalam petunjuk teknis BOS SMP. SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto membentuk team khusus untuk menangani pembelanjaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh sekolah. Team belanja tersebut yang akan bertugas untuk membeli barang/jasa yang dibutuhkan sekolah, disesuaikan dengan rencana anggaran belanja BOS SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto yang telah dibuat sebelumnya.

Pelaksanaan aspek pembukuan dana BOS SMP, pelaksanaan pembukuan yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto dibuat oleh bendahara BOS dalam melaksanakan pengelolaan dan BOS SMP. Pelaksanaan rekap data yang dilakukan oleh Bendahara BOS dilakukan setiap akhir bulan, sehingga terkadang saat melakukan pelaporan menyebabkan keterlambatan. Pada saat melakukan transaksi team belanja diharuskan meminta bukti transaksi kepada pihak penjuan untuk dijadikan sebagai bukti kepada Bendahara BOS bahwa telah terjadi transaksi, yang mana bukti itu akan dijadikan

sebagai kelengkapan dalam pelaksanaan pembukuan. Pembukuan dan bukti transaksi tersebut akan dijadikan sebagai lampiran yang selanjutnya akan dijadikan laporan.

Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS

Pengawasan dan BOS SMP dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam mengelola dana BOS SMP. Analisis hasil terhadap komponen pengawasan pengelolaan dana BOS SMP tahun 2019 di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto dilaksanakan oleh pihak internal sekolah dan pihak eksternal sekolah. Yang melaksanakan pihak internal sekolah yaitu Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten melalui pengawas sekolah. Pihak eksternal sekolah yang melaksanakan pengawasan yaitu Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat (Direktorat Pendidikan Menengah Atas). Selama proses Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS SMP tahun 2019 SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto tidak pernah memperoleh respon jelek dari orang tua siswa atau masyarakat sekolah terkait Pengelolaan Dana BOS yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto, oleh karena itu orang tua siswa telah merasa terbantu dengan adanya bantuan Dana BOS SMP.

Evaluasi Dana BOS SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat. Pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan yaitu terkait dengan hasil mengkaji laporan pengelolaan Dana BOS SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto yang dilaporkan oleh pihak sekolah. Hasil pengecekan dari Dinas Kabupaten SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto tidak terdapat kesalahan dalam penggunaan dan pengelolaan dana yang telah dilaksanakan oleh SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. Hasil evaluasi yang dilaksanakan komite SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto sudah termasuk kategori baik dan sudah terbuka bagi semua pengguna dan pelaksana dana.

Pelaporan Dana BOS

Analisis hasil Pelaporan BOS di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto, sekolah telah membuat laporan sesuai dengan petunjuk teknis BOS SMP. Pelaporan yang dilaksanakan oleh SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto yaitu ke Dinas Pendidikan Daerah, Provinsi dan Pusat secara online yang berisi laporan perencanaan dana sampai realisasi dana yang telah digunakan oleh SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. Selain itu kepada Dinas terkait, sekolah juga melaporkan Pengelolaan Dana BOS SMP kepada warga sekolah. Pelaporan kepada warga sekolah dilakukan pada saat rapat pleno, sekolah menyampaikan penggunaan dana BOS SMP kepada guru, komite sekolah dan wali siswa SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. Pelaporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atas terlaksananya Dana BOS SMP kepada Pemerintah Pusat yang dibuat oleh team Manajemen BOS SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto.

Simpulan

Hasil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 1) perencanaan dalam aspek penyusunan RAKS dan RAB BOS SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun 2019 dilaksanakan secara bersamaan. Anggaran yang disusun berdasarkan kumpulan kebutuhan dari guru, karyawan masing-masing bidang. Rencana anggaran yang tersusun kemudian dikomunikasikan kepada komite sekolah untuk dimintai pertimbangannya dan rencana biaya tersusun berdasarkan jumlah siswa yang kurang mampu yang terdaftar di sekolah. 2) Pelaksanaan Dana BOS SMP tahun 2019 diawali penyaluran dana BOS SMP. Dana BOS SMP tahun 2019 diterima tiap triwulan atau empat kali dalam satu tahun. Pengambilan dana BOS SMP dilakukan oleh Bendahara BOS dan Kepala Sekolah dengan menunjukkan dokumen yang dibutuhkan oleh Bank penyalur. Penggunaan dalam presentase dana BOS SMP di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto rata-rata banyak digunakan untuk kegiatan pengembangan standar pembiayaan Rp. 182.110.000,- (30,5%)

dan standar pengelolaan sekolah sebesar Rp. 153.618.515,- (25,7), kegiatan pengembangan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 99.087.360,- (16,7%), Pengembangan Standar Implementasi Sistem Penilaian Rp. 66.664.200,- (11,2%), Pengembangan Standar Proses Rp. 40.282.500,- (6,7%), Standar Pengembangan Kompetensi Kelulusan (SKL) Rp. 37.560.000,- (6,3%) Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp. 16.298.500 dan Pengembangan Standar ISI sebesar Rp. 1.378.925 (0,23%) dari total pengguna dana BOS SMP dari total penggunaan dana BOS SMP. 3) Pengawasan Pengelolaan Dana BOS SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto dilakukan oleh pihak internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Komite sekolah mengenai ketepatan Pengelolaan Dana BOS SMP yang sesuai dengan juknis BOS SMP dan RAB BOS SMP yang dibuat di awal tahun anggaran. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dengan mengirimkan instrumen untuk diisi oleh warga sekolah. 4) SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto melaporkan Pengelolaan Dana BOS kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi dan Pusat melalui online dan telah sesuai dengan pengaturan teknis BOS SMP tahun 2019.

Peneliti memberikan saran kepada SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto sebagai berikut: 1) untuk mendapatkan pelaporan penggunaan Dana BOS SMP yang baik, sebaiknya guru, karyawan dan kepala sekolah harus berkordinasi dengan baik agar tahap pembiayaan laporan berjalan dengan cepat dan tepat. 2) Sebaiknya komite sekolah tidak hanya melakukan pengecekan pada saat rapat pleno, melainkan melakukan pengecekan terhadap program yang sedang berjalan dan kelengkapan laporan seperti bukti transaksi dan hasil pembiayaan sekolah. 3) Supaya LPJ BOS tepat waktu, sebaiknya bendahara BOS lebih intens lagi dalam pengumpulan kelengkapan LPJ yang terkait.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Fitri, Afriliana. (2014). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/view/3753>
- Hallak, J. (1969). *The analysis of educational costs and expenditure*. Unesco: International Institute for Educational Planning.
- LPJ BOS SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun 2019.
- Mulyono. (2010). *Konsep pembiayaan pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2019 *Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah* 2014. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76. (2012). *tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013*.
- Rutter, M. M. B. M. P. & O. J., (1979). *Fifteen Thousand Hours: Secondary Schools and Their Effect on Children*. London: Prentice Hall. Inc.
- Supriyadi, Dedi. (2003). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Rosda Karya.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.